



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 100.1.4.2/13 /KPTS/35.07.100/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG NOMOR 188.4/30/KPTS/35.07.100/2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MALANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (4) huruf a dan huruf d Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang disebutkan bahwa jumlah anggota Komisi 1 sebanyak 11 orang dan jumlah anggota Komisi IV sebanyak 12 orang;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 008/F-PKB/V/2025 perihal Usulan Perubahan Personil AKD, tanggal 28 Mei 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Atas Keputusan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/30/KPTS/35.07.100/2024 Tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang hari Rabu.Tanggal 28 Mei 2025 tentang rencana kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Bulan Juni 2025;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Selasa, Tanggal 3 Juni 2025 dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2029, Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dan Perubahan Mitra Kerja Komisi DPRD Kabupaten Malang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/30/KPTS/35.07.100/2024 Tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu pada Komisi I atas Nama Hj. CHOIRUL UMAH jabatan Anggota Komisi I, pindah ke Komisi IV dengan jabatan Anggota Komisi IV, selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
Pada Tanggal 3 Juni 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MALANG**

Ketua,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN MALANG  
 NOMOR : 100.1.4.2/13/KPTS/35.07.100/2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN ATAS  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR  
 188.4/30/KPTS/35.07.100/2024 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG MASA  
 JABATAN TAHUN 2024-2029;

### SUSUNAN KEANGOTAAN KOMISI

#### A. KOMISI I (BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN):

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	AMARTA FAZA, S.T., M.Sos.	KETUA	FRAKSI PARTAI NASDEM
2.	REDAM GURUH KRISMANTARA, S.H.	WAKIL KETUA	FRAKSI PDI-P
3.	RAHMAT KARTALA	SEKRETARIS	FRAKSI PARTAI GERINDRA
4.	IMAM SUPIT	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	BUSILAN, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	MAHRUS ALI	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	FAKIH PILIHAN	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	DOFIC SOROANGGOMO, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	ABDUL GHOFUR	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	ABDULLOH AZIZ	ANGGOTA	FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT

**B. KOMISI II (BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN):**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET.</b>
1.	H. ALI MURTADLO, S.H.	KETUA	FRAKSI PKB
2.	H. ACHMAD ANDI, S.H, M.Hum.	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI NASDEM
3.	VENNY AYU SORAYA	SEKRETARIS	FRAKSI PDI-P
4.	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	SUGIANTO	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	FITRI YUHANA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
8.	MUHAMMAD UKASYAH ALI MURTADHO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
9.	Ir. SUDJONO, M.P.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	Dr. MISKAT, S.H., M.H.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	SYAIFUL ROSYID, S.E., M.Si.	ANGGOTA	FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT

**C. KOMISI III (BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR) :**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET.</b>
1.	Dr. TANTRI BARAROH, S.E., M.Ak.	KETUA	FRAKSI PDI-P
2.	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
3.	H. ABDULLOH SATAR, S.E., M.M.	SEKRETARIS	FRAKSI PKB
4.	ABDUL QODIR, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	H. KUNCORO, S.H., M.Kn.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	ARIS WASKITO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA

9.	RODHIYAH AHLA SAMAR, S.I.P.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	SODIKUL AMIN	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	AGUNG DWI SUSANTO, S.P.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
12.	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	ANGGOTA	FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT

**D. KOMISI IV (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) :**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	ZIA'UL HAQ	KETUA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
2.	MUSLIMIN, S.Pd., M.H.	WAKIL KETUA	FRAKSI PKB
3.	MUCHAMMAD HAFIDZ	SEKRETARIS	FRAKSI PDI-P
4.	ZULHAM AKHMAD MUBARROK	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	SUMAT	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
<b>6.</b>	<b>Hj. CHOIRUL UMAH</b>	<b>ANGGOTA</b>	<b>FRAKSI PKB</b>
7.	NUR MUTIAH FARIDAH	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	FERI ANDI SUSEKO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
9.	KHOIRUN, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	SURYA HANTA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	SUDHA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
12.	SUTRISNO MURDI, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

